**ANALISIS DAMPAK REALISASI DANA OTONOMI KHUSUS TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI PROVINSI ACEH**

**OLEH**

DEVI ANDRIYANI. SP., M.Si

Abstract

This research aims to determine effects of special autonomy funds realization on economic growth in aceh province. This research used secondary data since 2008 -2015, Analysis methods is regression analysis. The results showed, coefficient of determination (R2) 0.099749 it’s means effect of special autonomy fund's can explain economic growth until 9.9749%. Testing the hypothesis partially (t-test), special autonomy fund variables did not significantly effect the variables economic growth (at α = 0.05). The results indicated, special autonomy fund variables did not significantly effect economic growth in the province of aceh 2008-2015.

Keywords: Special Autonomy Fund, Economic Growth

**LATARBELAKANG PENELITIAN**

Pemerintah merupakan salah satu pelaku ekonomi yang memegang peranan penting dalam perekonomian. Pemerintah memiliki kekuatan serta kemampuan untuk mengatur dan mengawasi perekonomian disamping itu juga mampu melaksanakan kegiatan-kegiatan ekonomi yang tidak dapat dilaksanakan oleh unit ekonomi lainnya seperti rumah tangga dan perusahaan. Kebijakan-kebijakan yang dibuat pemerintah pusat akan berdampak langsung pada pemerintahan dibawahnya. Karenanya pemberlakuan otonomi daerah akan lebih memudahkan dalam mewujudkan pertumbuhan perekonomian.

Pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan otonomi daerah, perlu memperhatikan hubungan antara susunan pemerintahan pusat dengan susunan pemerintahan daerah, potensi daerah dan keanekaragaman daerah. Prinsip otonomi daerah menggunakan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam arti daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan di luar yang menjadi urusan pemerintah yang ditetapkan dalam undang-undang. Daerah memiliki kebijakan daerah untuk memberi pelayanan, peningkatan peran, prakarsa dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat. Dalam mengalokasikan pembelanjaan atas sumber-sumber penerimaannya yang terkait dengan fungsi desentralisasi, Pemerintah daerah memiliki kebijakan penuh untuk menentukan besaran dan sektor apa yang akan dibelanjakan yang dituangkan dalam Anggaran Penerimaan dan Belanja Daerah (APBD).

Pertumbuhan ekonomi merupakan hasil output yang dibentuk oleh berbagai sektor ekonomi sehingga dapat menggambarkan bagaimana kemajuan atau kemunduran yang telah dicapai oleh sektor ekonomi pada suatu kurun waktu tertentu. Tingkat pertmbuhan ekonomi menunjukkan sejauh mana aktivitas perekonomian akan menghasilkan tambahan pendapatan masyarakat pada suatu Tahun tertentu. Pertumbuhan merupakan ukuran utama keberhasilan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi akan pula dinikmati oleh masyarakat sampai dilapisan paling bawah baik dengan sendirinya maupun dengan campur tangan pemerintah. Tingkat pertumbuhan harus berjalan secara beriringan dan terencana mengupayakan terciptanya pemerataan kesempatan dan pembagian hasil-hasil pembangunan dengan merata.

Pelaksanaan otonomi daerah yang ditandai dengan diberlakukannya UU No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (dalam perkembangannya kedua regulasi ini diperbaharui dengan UU No. 32 tahun 2004 dan UU No 33 tahun 2004) menjadi babak baru terkait dengan hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Daerah (kabupaten dan kota) diberikan kewenangan yang lebih luas dalam mengelola berbagai sumber daya yang dimiliki. Daerah diharapkan mengalami percepatan pertumbuhan ekonomi yang dapat meningkatkan kinerja keuangan daerah dan berujung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Idealnya pelaksanaan otonomi daerah harus mampu mengurangi ketergantungan terhadap pemerintah pusat, daerah menjadi lebih mandiri, yang salah satunya di indikasikan dengan meningkatnya kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam hal pembiayaan daerah.

Pemberian otonomi daerah berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi suatu daerah karena memberikan kebebasan kepada pemerintah daerah untuk membuat rencana keuangannya sendiri dan membuat kebijakan-kebijakan yang dapat berpengaruh pada kemajuan daerahnya. Pertumbuhan ekonomi mendorong pemerintah daerah untuk melakukan pembangunan ekonomi dengan mengelola sumber daya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan dengan masyarakat untuk menciptakan lapangan pekerjaan baru yang akan mempengaruhi perkembangan kegiatan ekonomi dalam daerah tersebut. Kuncoro (2004).

Otonomi daerah menekankan terhadap peranan dan kemampuan pemerintah daerah dalam pembangunan dan pengelolaan keuangan daerah yang diupayakan bertambah besar. Pengelolaan keuangan daerah pada dasarnya merupakan pelaksanaan desentralisasi kewenangan dalam penyelenggaraan urusan pemerintah di daerah, dimana pemerintah pusat memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendri, menggali pendapatan daerah dan mengalokasikan dana bagi pelayanan umum, serta kewenangan dalam pembuatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), (Wulandari, 2014).

Otonomi khusus adalah kewenangan khusus yang diberikan kepada daerah tertentu untuk mengatur kepentingan masyarakat daerahnya, menurut hak dan aspirasi masyarakat didaerah tersebut sehingga daerah tersebut menjadi lebih baik. Berbagai masalah yang muncul akibat adanya dana otonomi khusus adalah mengenai kewenangan pengelolaan keuangan yang bersumber dari Dana Otonomi Khusus, sesuai pasal 179 ayat (2) dengan tegas menyebutkan sumber pendapatan daerah baik dipemerintahan Provinsi Aceh dan pemerintah kabupaten/kota salah satunya berasal dari Dana Otonomi Khusus, Namun secara administratif, Undang-Undang Pemerintah Aceh memberikan kewenangan pada tingkat provinsi, sehingga memberikan kesan bahwa Pemerintahan Kabupaten/Kota tidak memiliki kewenangan dalam pengelolaan Dana Otonomi Khusus. Tabel dibawah ini memperlihatkan perbandingan data dana otonomi khusus dengan data pertumbuhan ekonomi aceh dari tahun 2008 hingga tahun 2015 di provinsi Aceh.

**Tabel 1.Dana Otonomi Khusus dan Pertumbuhan Ekonomi Aceh**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Tahun | Dana Otonomi Khusus (Rp-juta) | Pertumbuhan Ekonomi (%) |
| 2008 | 1.472.133 | 1,88 |
| 2009 | 1.610.272 | 3,97 |
| 2010 | 1.612.838 | 5,32 |
| 2011 | 2.200.772 | 5,89 |
| 2012 | 2.769.895 | 5,14 |
| 2013 | 2.937.013 | 4,18 |
| 2014 | 3.850.037 | 4,68 |
| 2015 | 4.046.416 | 4,34 |

 Sumber Data BPS (2015)

**PERUMUSAN MASALAH**

 Dana otsus yang diterima oleh provinsis Aceh pemanfaatanya nya belum maksimal digunakan untuk kesejahteraan rakyat seperti meningkatkan pendidikan, kesehatan dan perekonomian, tetapi lebih dimanfaatkan untuk pembangunan kantor pemerintahan yang megah. Ini merupakan wujud kurangnya kepedulian Pemerintahan Aceh, misalnya di bidang pendidikan Hasil Ujian Nasional tahun 2013 dan 2014 memperlihatkan jumlah kelulusan SMA/MA/SMK di Aceh terendah di tingkat nasional. Begitu pula halnya mengenai kinerja pemerintahan. Tingkat korupsi masih cukup tinggi, Tercatat 141 kasus korupsi yang masih mengambang di tingkat kejaksaan, 43 kasus diantaranya sudah pada tahap penuntutan dan 54 lainnya tahap penyidikan. Sedangkan kasus dugaan korupsi yang sudah sampai tahapan penyelidikan oleh KPK, adalah kasus korupsi pengadaan alat kesehatan Aceh Tamiang tahun 2010 sebesar Rp 8,842 M. Ini membuktikan bahwa dana otsus di Provinsi Aceh belum mencapai pemanfaatan yang maksimal untuk kesejahteraan. (<http://regional.kompas.com>)

Jika dilihat realisasi pengelolaan dana otsus di lapangan selalu bermasalah, ditambah kurangnya kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Hasil evaluasi Departemen Dalam Negeri menyatakan Provinsi Aceh salah satu provinsi yang mendapat skor terburuk dalam otonomi daerah. Selain daerah Aceh, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat dan Papua juga mengalami hal yang sama. Kementrian membuat pemeringkatan itu berdasarkan 173 indikator yang termuat dalam laporan kinerja penyelengaraan otonomi daerah tahun 2009, indikator ini antara lain: kinerja keuangan, pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas. (Hukumpedia.com).

 Dan berdasarkan tabel 1 diatas menunjukkan dana otsus setiap tahun meningkat sedangkan pertumbuhan ekonomi nya bersifat fluktuatif. Karenanya penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai Analisis dampak Realisasi Dana Otonomi Khusus Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Provinsi Aceh sejak dari dikucurkannya dana otonomi khusus tahun 2008 hingga tahun 2015**.**

**LANDASAN TEORITIS**

**Pengertian Pertumbuhan Ekonomi.** Prof.Simon Kuznets, mendefinisikan pertumbuhan ekonomi sebagai ”kenaikan jangka panjang dalam kemampuan suatu negara untuk menyediakan semakin banyak jenis barang-barang ekonomi kepada penduduknya. Kemampuan ini tumbuh sesuai dengan kemajuan teknologi, dan penyesuaian kelembagaan dan idiologis yang diperlukannya. Definisi ini mempunyai 3 (tiga) komponen: *pertama*, pertumbuhan ekonomi suatu bangsa terlihat dari meningkatnya secara terus-menerus persediaan barang; *kedua,* teknologi maju merupakan faktor dalam pertumbuhan ekonomi yang menentukan derajat pertumbuhan kemampuan dalam penyediaan aneka macam barang kepada penduduk; *ketiga,* penggunaan teknologi secara luas dan efisien memerlukan adanya penyesuaian di bidang kelembagaan dan idiologi sehingga inovasi yang dihasilkan oleh ilmu pengetahuan umat manusia dapat dimanfaatkan secara tepat (Jhingan, 2000).

Pertumbuhan ekonomi adalah suatu proses kenaikan output perkapita dalam jangka panjang, dimana penekanannya pada tiga hal yaitu proses, output perkapita dan jangka panjang. Pertumbuhan ekonomi adalah suatu “proses” bukan suatu gambaran ekonomi pada suatu saat. Disini kita melihat aspek dinamis dari suatu perekonomian, yaitu melihat bagaimana suatu perekonomian berkembang atau berubah dari waktu ke waktu. Tekanannya pada perubahan atau perkembangan itu sendiri. Sejak lama ahli-ahli ekonomi telah menganalisis faktor-faktor penting yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Berdasarkan kepada pertumbuhan ekonomi yang berlaku diberbagai negara dapat disimpulkan bahwa faktor utama yang mempengaruhi pertumbuhan dan pembangunan suatu negara adalah: kekayaan sumber daya alam dan tanahnya, jumlah dan mutu tenaga kerja, barang-barang modal yang tersedia, tingkat teknologi yang digunakan dan sistem sosial dan sikap masyarakat.

**Indikator Pertumbuhan Ekonomi.** Menurut M. Suparmoko dan Maria R. Suparmoko, (2000) ada beberapa macam alat yang dapat digunakan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi yaitu:

1. Produk domestik bruto (PDB) adalah jumlah barang dan jasa akhir yang dihasilkan dalam harga pasar. Kelemahan PDB sebagai ukuran pertumbuhan ekonomi adalah sifatnya yang global dan tidak mencerminkan kesejahteraan penduduk.
2. PDB per kapita atau pendapatan perkapita merupakan ukuran yang lebih tepat karena telah memperhitungkan jumlah penduduk. Jadi ukuran pendapatan perkapita dapat diketahui dengan membagi PDB dengan jumlah penduduk.
3. Pendapatan per jam kerja yaitu suatu negara dapat dikatakan lebih maju dibandingkan dengan negara lain adalah bila mempunyai tingkat pendapatan atau upah per jam kerja yang lebih tinggi daripada upah per jam kerja di negara lain untuk jenis pekerjaan yang sama.

Menurut pandangan ahli-ahli ekonomi klasik, ada 4 faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, yaitu: jumlah penduduk (kaitannya dengan jumlah tenaga kerja), jumlah stok barang-barang modal, luas tanah dan kekayaan alam, serta tingkat teknologi yang digunakan.

**Pengertian Dana Otonomi Khusus.** Menurut Anggara (2007), Otonomi Khusus adalah salah satu bagian dari apa yang dinamakan Hak untuk menentukan nasib sendiri. Menurut suparmoko dalam handayani dan njuraina (2012), dana otonomi khusus adalah dana yang berasal dari APBN dan dialokasikan ke kabupaten/kota untuk membiayai kebutuhan tertentu yang sifatnya khusus, tergantung pada tersedia nya dana dalam APBN, yang dimaksud kebutuhan khusus adalah kebutuhan yang sulit diperkirakan dengan rumus alokasi umum dan/ kebutuhan yang merupakan komitmen atau prioritas nasional. Dana otonomi khusus digunakan mendanai untuk pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur, pemberdayaan ekonomi rakyat, pengentasan kemiskinan, serta pendanaan pendidikan, sosial, dan kesehatan.

Otonomi Khusus merupakan sebuah otonomi yang diberikan pemerintah Indonesia terhadap Provinsi Aceh yang memiliki berbagai hak-hak khusus seperti memiliki lembaga yudikatif dengan majelisnya hingga berhak untuk berpartisipasi terhadap hubungan luar negeri pemerintah Indonesia yang berkaitan dengan Provinsi Aceh itu sendiri. Dalam Otonomi Khusus Provinsi Aceh memiliki beberapa sumber pendapatan yang berbeda dengan daerah pada umumnya. Dana Otonomi Khusus Provinsi Aceh dalam APBN ditetapkan besarannya setara 2 persen dari DAU nasional, Penetapan ini sesuai dengan amanat Undang Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Penggunaannya diarahkan untuk mendanai pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur, pemberdayaan ekonomi rakyat, pengentasan kemiskinan, serta pendanaan pendidikan, sosial, dan kesehatan. Dengan sistem otonomi daerah tiap wilayah Kabupaten dan kota dapat menyediakan berbagai pelayanan publik yang beragam, sesuai dengan kebutuhan daerahnya. Pembagian kewenangan antara pusat dan daerah haruslah berdasarkan pada prinsip efisiensi, agar sistem otonomi ini dapat berjalan dengan optimal.

**Sumber Dana Otonomi Khusus.** Dana otsus yang di berikan untuk provinsi Aceh bersumber dari dana perimbangan Provinsi dalam rangka pelaksanaan otonomi khusus terdiri atas:

1. Dana Bagi Hasil pajak, (yaitu: Bagian dari penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sebesar 90%, Bagian dari penerimaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan. Bagian dari penerimaan Pajak Penghasilan (PPh Pasal 25 dan Pasal 29 wajib pajak orang pribadi dalam negeri dan PPh Pasal 21) sebesar 20%).
2. Dana Bagi Hasil yang bersumber dari hidrokarbon dan sumber daya alam lain, (yaitu: a. Bagian dari kehutanan sebesar 80%.b. Bagian dari perikanan sebesar 80%. c. Bagian dari pertambangan umum sebesar 80%. d. Bagian dari pertambangan panas bumi sebesar 80%. e. Bagian dari pertambangan minyak sebesar 15%. f. Bagian dari pertambangan Gas Bumi sebesar 30%.
3. Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus. Dana alokasi umum (DAU) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional dalam rangka mendorong percepatan pembangunan daerah dan pencapaian sasaran nasional.
4. Pemerintah Aceh mendapat tambahan Dana Bagi Hasil minyak dan gas bumi yang merupakan bagian dari penerimaan Pemerintah Aceh, yaitu: Bagian dari pertambangan minyak sebesar 55% dan Bagian dari pertambangan gas bumi sebesar 40%.

Alokasi Dana otonomi Khusus berlaku untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun, dimana jumlah dana otsus yang diterima provinsi Aceh tidaklah selalu sama, dengan demikian diharapkan pemerintah dapat memanfaatkan dana otsus tersebut dengan baik dan tepat sasaran sehingga tujuan dari diberikan nya dana tersebut dapat terpenuhi. Dana otsus diberikan untuk provinsi Aceh selama 20 tahun, dimulai pada tahun 2008 sampai dengan tahun 2022 dengan anggaran 2% dari DAU Nasional, dan pada tahun 2023 sampai tahun 2027 adalah 1% dari DAU nasional. Pembagian dana otsus tersebut berdasarkan peraturan gubernur (pergub) adalah 60% diberikan untuk di manfaatkan oleh seluruh kabupaten/kota di provinsi Aceh, sedangkan 40% akan dimanfaatkan oleh provinsi.

**Hubungan dana Otonomi Khusus dengan Pertumbuhan ekonomi.** Secara teoritis sederhana, alokasi dana besar bagi pembangunan suatu daerah akan meningkatkan kesejahteraan penduduk di daerah tersebut atau diistilahkan dengan hipotesis *trickle down effect*. hipotesis *trickle down effect* mengasumsikan perlunya memprioritaskan pertumbuhan ekonomi terlebih dahulu, baru kemudian dilakukan pemerataan. Contohnya adalah pada tahun ini diberikan modal usaha untuk meningkatkan ekonomi seseorang atau sekelompok orang, kemudian pada tahun selanjutnya pemberian modal usaha ini akan diberikan kepada individu atau kelompok yang lain, sehingga semua orang dapat meningkatkan ekonomi dengan pemberian modal usaha secara merata. Kuncoro (2003: 36) mengemukakan bahwa *trickle down effect* merupakan dampak yang merembes ke bawah, sehingga dapat diartikan apabila pertumbuhan ekonomi meningkat maka akan berdampak baik pula bagi pembangunan ekonomi manusia.

Peran komponen pembangunan di dalam pemerintah Aceh untuk melalukan percepatan pembangunan. Harus disadari keberhasilan suatu model pembangunan yang diterapkan melalui dana otonomi khusus oleh pemerintah, swasta dan masyarakat sebagai komponen pembangunan di Aceh ditunjukkan oleh sejauh mana Aceh mampu mengejar ketertinggalan pembangunan yang telah dilakukan oleh daerah-daerah lainnya di Indonesia. Hal ini sangat relevan dengan sejauh mana akumulasi produktifitas pembangunan yang dijalankan oleh 23 kabupaten/kota di Aceh dalam memanfaatkan dana otonomi khusus. Sumber pembiayaan besar yang sifatnya terbatas seharusnya dapat dimanfaatkan oleh seluruh komponen dengan mengedepankan prioritas pembangunan. Apabila model pembangunan tersebut gagal, maka daerah-daerah lain akan menuntut Aceh sebagai sebuah provinsi yang tidak produktif. peran komponen pembangunan di dalam pemerintah Aceh untuk melalukan percepatan pembangunan. Harus disadari keberhasilan suatu model pembangunan yang diterapkan melalui dana otonomi khusus oleh pemerintah, swasta dan masyarakat sebagai komponen pembangunan di Aceh ditunjukkan oleh sejauh mana Aceh mampu mengejar ketertinggalan pembangunan yang telah dilakukan oleh daerah-daerah lainnya di Indonesia.

Secara umum, penyebab rendah dan lambatnya pembangunan prioritas otonomi khusus disebabkan karena:pemetaan objek ketertinggalan pembangunan yang kurang tepat oleh pemerintah, sehingga percepatan pembangunan tidak berjalan dengan baik bahkan cenderung tidak tepat sasaran. Penyebab lainnya adalah sebagian besar birokrasi belum mampu mensinergikan konsep modern pembangunan ke dalam konteks lokal, sehingga tidak efektif dan efisien.

**PENELITIAN SEBELUMNYA**

Duwith Richard (2010) melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Dana Otonomi Khusus Dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Provinsi Papua Tahun 2002-2009”. Hasil analisis data penelitian menunjukkan Nilai PAD berpengaruh positif dan Nilai Dana Otonomi Khusus berpengaruh negatif sehingga dapat di simpulkan bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif dan signifikan sedangkan dana otonomi khusus tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi Provinsi Papua. Persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah sama-sama meneliti tentang pengaruh dana otonomi khusus terhadap pertumbuhan ekonomi. Sedangkan perbedaannya adalah terdapat pada lokasi penelitian, dimana pada penelitian ini lokasi penelitiannya di Provinsi Aceh, sedangkan pada penelitian sebelumnya lokasi penelitiannya di Provinsi Papua.

Imam Sumardjoko (2008) melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Penerimaan Dana Otonomi Khusus Terhadap Indek Pembangunan Manusia Papua Dan Papua Barat Dengan Belanja Modal Sebagai Variabel Intervening”, hasil penelitian menunjukkan bahwa penerimaan dana otonomi khusus memiliki pengaruh yang signifikan pada indeks pembangunan manusia di Papua dan Papua Barat melalui belanja modal sebagai variabel intervening. Penerimaan dana otonomi khusus dalam anggaran provinsi Papua dan Papua Barat menjadi pengembangan akselerator di daerah untuk mengejar ketinggalan dengan daerah lain. Ini terlihat pada tingkat indek pembangunan manusia pada dua provinsi tersebut telah meningkat sejak pelaksanaan otonomi khusus. Persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah sama-sama meneliti tentang pengaruh dana otonomi khusus. Sedangkan perbedaanya adalah pada penelitian ini variabel terikat yang digunakan adalah pertumbuhan ekonomi dan penelitian dilakukan di provinsi aceh sedangkan pada penelitian sebelumnya yang menjadi variabel terikat adalah indek pembangunan manusia, dan penelitian dilakukan di Papua dan Papua Barat.

**HIPOTESIS PENELITIAN**

Hipotesis adalah dugaan sementara yang masih memerlukan pengujian. Hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: “Diduga Dana Otonomi Khusus berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Aceh”

**METODE PENELITIAN**

**Objek dan lokasi penelitian**. Penelitian ini dilakukan di provinsi Aceh, dengan objek penelitian adalah dana otonomi khusus dan tingkat pertumbuhan ekonomi. Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder berbentuk time series (berkala) yang dimulai dari tahun 2008 sampai dengan 2015.

**Tehnik analisa data.** Analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : Analisa Deskriptif, yaitu analisa yang digunakan untuk mendeskripsikan hasil penelitian dengan menggunakan tabulasi dan grafik. Dengan metode deskripsi diharapkan dapat menerangkan dampak dari realisasi dana otonomi khusus terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Aceh. Dan Analisa Kuantitatif yaitu analisa yang menggambarkan hubungan antar variabel dengan menggunakan analisa regresi berganda. Analisa ini digunakan untuk menguji pengaruh variabel bebas *(independen*) terhadap variabel tak bebas (terikat / *dependen*). Adapun model analisis dalam penelitian ini adalah:

Y = a + bX + e

Y = Pertumbuhan Ekonomi

X = Dana Otonomi Khusus

a = Konstanta

b = Koefisien Regresi

e = Error Term

Untuk mengatasi besarnya angka Dana Otonomi Khusus dibandingkan Pertumbuhan Ekonomi maka data perlu di log untuk data Dana Otonomi Khusus.Model ditransformasi ke model Log, dengan alasan: untuk memudahkan estimasi yang lebih efisien, untuk mengurangi risiko terkena heteroskedastisitas. Sehingga model berubah menjadi sebagai berikut :

Y = a + b logX+e

**Definisi Operasional Variabel.** Dana otonomi khusus (X) adalah dana yang dialokasikan untuk membiayai pelaksanaan otonomi khusus suatu daerah setiap tahun. penelitian ini mengkhususkan dana otonomi khusus untuk Provinsi Aceh dan dihitung dengan rupiah sedangkan pertumbuhan ekonomi (Y) adalah perkembangan hasil produksi barang dan jasa dalam suatu wilayah tertentu dan dalam periode tertentu biasanya 1 tahun. Penelitian ini mengkhususkan pertumbuhan ekonomi di Provinsi Aceh dan diukur dengan persen.

**Uji Asumsi Klasik.**

**Uji Autokorelasi** yaitu uji ini untuk melihat adanya hubungan antara kesalahan pengganggu yang muncul pada data runtun waktu*(time series)*. Pengujian autokorelasi dapat dilakukan dengan menghitung menggunakan metode Brusch-Godfrey atau LM *( Lagrange Multiplier Test)* yaitu dengan membandingkan nilai probaability F hitung dengan nilai alpha, jika prob. F hitung > alpha 0.05 (5%) artinya tidak terjadi autokorelasi. Sebaliknya, apabila prob. F hitung < alpha 0.05 (5%) artinya terjadi autokorelasi.

**Uji Heteroskedastisitas**  bertujuan untuk mengetahui apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari suatu residual pengamatan ke pengamatan yang lain.

**Pengujian Hipotesis** dalam penelitian ini menggunakan **Uji parsial (uji t)** Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel penjelas/independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen. Apabila t hitung > t tabel, artinya variabel penjelas secara parsial mempengaruhi variabel yang dijelaskan secara signifikan. Dan apabila t hitung < t tabel, artinya variabel penjelas secara parsial atau satu-satu tidak mempengaruhi variabel yang dijelaskan secara signifikan. **Koefisien Determinasi (R2)** pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen (terikat).

**HASIL PENELITIAN**

|  |
| --- |
| **Deskripsi Penelitian** Date: 11/08/16 Time: 01:18  |
| Sample: 2008 2015  |
|  X  |  Y  |
| Mean  | 2.56E+12  | 4.425000  |
| Median  | 2.49E+12  | 4.510000  |
| Maximum  | 4.05E+12  | 5.890000  |
| Minimum  | 1.47E+12  | 1.880000  |
| Std. Dev.  | 1.01E+12  | 1.211540  |
| Skewness  | 0.353704  | -1.060626  |
| Kurtosis  | 1.662168  | 3.600355  |
| Jarque-Bera  | 0.763407  | 1.620047  |
| Probability  | 0.682698  | 0.444848  |
| Sum  | 2.05E+13  | 35.40000  |
| Sum Sq. Dev.  | 7.17E+24  | 10.27480  |
| Observations  | 8  | 8  |

Tabel diatas menunjukkan bahwa nilai rata-rata dari variabel pertumbuhan ekonomi sebesar 4.42% dengan nilai standar deviasi sebesar 1.21 %, ini menunjukkan tingkat keseragaman data yang rendah. Tetapi untuk keragaman data, variabel Dana Otonomi khusus sedikit lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi. Hal ini ditunjukkan oleh perbandingan mean dan standar deviasi untuk dana otonomi khusus.

**Uji Autokorelasi**

|  |
| --- |
| **Uji Autokorelasi** Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:  |
| F-statistic  | 0.731691  | Prob. F(2,4)  | 0.5360  |
| Obs\*R-squared  | 2.142822  | Prob. Chi-Square(2)  | 0.3425  |
|  |  |  |  |

Berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan bahwa nilai Prob. F(2,4) sebesar 0.5360 > 0.05, artinya tidak terjadi autokorelasi.

**Uji Heteroskedasticity**

|  |
| --- |
| Heteroskedasticity Test: White  |
| F-statistic  | 1.668055  | Prob. F(2,5)  | 0.2786  |
| Obs\*R-squared  | 3.201598  | Prob. Chi-Square(2)  | 0.2017  |
| Scaled explained SS  | 1.400930  | Prob. Chi-Square(2)  | 0.4964  |
|  |  |  |  |

Berdasarkan Tabel di atas menunjukkan bahwa data atau model penelitian ini terbebas dari heteroskedastisitas. Hal tersebut dapat dilihat dari nilai Prob R-square 0.2017 > 0.05.

**Hasil regresi**

|  |
| --- |
| Dependent Variable: Y  |
| Method: Least Squares  |
| Date: 11/08/16 Time: 01:06  |
| Sample: 2008 2015  |
| Included observations: 8  |
| Variable  | Coefficient  | Std. Error  | t-Statistic  | Prob.  |
| C  | -22.82774  | 33.42726  | -0.682908  | 0.5201  |
| LOG(X)  | 0.956152  | 1.172681  | 0.815355  | 0.4460  |
| R-squared  | 0.099749  | Mean dependent var  | 4.425000  |
| Adjusted R-squared  | -0.050293  | S.D. dependent var  | 1.211540  |
| S.E. of regression  | 1.241632  | Akaike info criterion  | 3.483049  |
| Sum squared resid  | 9.249904  | Schwarz criterion  | 3.502909  |
| Log likelihood  | -11.93219  | Hannan-Quinn criter.  | 3.349098  |
| F-statistic  | 0.664804  | Durbin-Watson stat  | 0.874734  |
| Prob(F-statistic)  | 0.446020  |
|  |  |

Berdasarkan data dari tabel diatas dapat diformulasikan persamaan Analisis Regresi Linier Sederhana sebagai berikut: Y= -22.82774 + 0.956152X

Berdasarkan persamaan diatas secara ekonomi dapat diinterpretasikan sebagai berikut:

1. Koefisien a =-22.82774 ini berarti jika Dana Otonomi Khusus dianggap konstan atau sama dengan nol maka pertumbuhan ekonomi menurun sebesar 22.83 %.
2. Koefisien b = 0,956152 ini berarti jika jumlah Dana Otonomi Khusus meningkat 1%, maka menyebabkan pertumbuhan ekonomi meningkat sebesar 0,96%.

Koefisien determinasi (R2) sebesar 0.099749 ini berarti 9.9749 % perubahan dalam pertumbuhan ekonomi dapat dijelaskan oleh dana otonomi khusus dan sisanya 90.0251% dijelaskan oleh variabel lain selain dana otonomi khusus.

**Uji Parsial ( Uji-t )** Pengujian hipotesis menggunakan uji t, dengan tingkat keyakinan (*level of signifikan*) 0.05 (α=5%). Pada tabel diatas menunjukkan bahwa variabel Dana Otonomi Khusus memiliki thitung 0.815355 dan nilai ttabel dengan df = n-k (8-2 =6) pada α = 0.05 diperoleh nilai sebesar 2.477, dapat disimpulkan bahwa thitung<ttabel yaitu 0.815355 < 2.477 dengan nilai signifikan > 0.05 maka ini berarti secara parsial variabel Dana Otonomi Khusus secara signifikan tidak mempengaruhi variabel Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Aceh tahun 2008-2015. Secara teori, alokasi dana besar bagi pembangunan suatu daerah akan meningkatkan kesejahteraan penduduk di daerah tersebut atau diistilahkan dengan hipotesis *trickle down effect.* Namun hasil penelitian yang didapat oleh penulis realisasi Dana Otonomi Khusus secara signifikan tidak memberikan dampak apapun terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Aceh. Hal ini menurut penulis disebabkan karena pemanfaatan dana otonomi khusus yang tidak tepat sasaran dan masih tingginya tingkat korupsi.

**Pembahasan**

Dari hasil pengujian yang dilakukan, diperoleh hasil dana otonomi khusus secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Aceh. Menurut peneliti hal ini sesuai dengan pemberitaan pada (http://regional. kompas.com) yang menyatakan bahwa : Dana otsus yang diterima oleh provinsi Aceh pemanfaatanya nya belum maksimal digunakan untuk kesejahteraan rakyat seperti meningkatkan pendidikan, kesehatan dan perekonomian, tetapi lebih dimanfaatkan untuk pembangunan kantor pemerintahan yang megah. Ini merupakan wujud kurangnya kepedulian Pemerintahan Aceh, misalnya di bidang pendidikan Hasil Ujian Nasional tahun 2013 dan 2014 memperlihatkan jumlah kelulusan SMA/MA/SMK di Aceh terendah di tingkat nasional. Begitu pula halnya mengenai kinerja pemerintahan. Tingkat korupsi masih cukup tinggi, Tercatat 141 kasus korupsi yang masih mengambang di tingkat kejaksaan, 43 kasus diantaranya sudah pada tahap penuntutan dan 54 lainnya tahap penyidikan. Sedangkan kasus dugaan korupsi yang sudah sampai tahapan penyelidikan oleh KPK, adalah kasus korupsi pengadaan alat kesehatan Aceh Tamiang tahun 2010 sebesar Rp 8,842 M. Ini membuktikan bahwa dana otsus di Provinsi Aceh belum mencapai pemanfaatan yang maksimal untuk kesejahteraan.

Sesuai juga dengan yang disampaikan oleh Hukumpedia.com yang menyatakan : Jika dilihat realisasi pengelolaan dana otsus di lapangan selalu bermasalah, ditambah kurangnya kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Hasil evaluasi Departemen Dalam Negeri menyatakan Provinsi Aceh salah satu provinsi yang mendapat skor terburuk dalam otonomi daerah.

Hasil penelitian penulis juga sama dengan hasil penelitian terdahulu yaitu penelitian yang dilakukan oleh Duwith Richard (2010) yang berjudul “Pengaruh Dana Otonomi Khusus Dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Provinsi Papua Tahun 2002-2009” dimana hasil penelitian menunjukkan bahwa dana otonomi khusus tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi Provinsi Papua.

**Kesimpulan**

Dari penelitian yang sudah dilakukan dapat disimpulkan bahwa realisasi dana otonomi khusus sejak tahun 2008 hingga 2015 tidak memberikan dampak yang cukup besar terhadap tingkat pertumbuhan ekonomi di provinsi aceh. Hal ini dikarenakan Dana otonomi khusus yang diterima oleh provinsi Aceh pemanfaatanya belum maksimal digunakan untuk kesejahteraan rakyat dan juga tidak tepatnya sasaran dalam pengalokasiannya, serta tingginya angka korupsi yang terjadi terhadap dana tersebut.

**Saran**

1. Besar harapan penulis pemerintah dapat memanfaatkan dan mampu mewujudkan sistem transparansi dalam pengalokasian dana otonomi khusus, sehingga alokasinya selalu tepat sasaran sesuai dengan tujuan awal adanya dana otonomi khusus. Sehingga mampu membantu terciptanya pertumbuhan ekonomi masyarakat dan daerah.
2. Adanya kontrol dari pemerintah pusat dan lembaga-lembaga kemasyarakatan dalam pemakaian dana otonomi khusus.

**KEPUSTAKAAN**

Anggara, D. (2007). Rekonstruksi dan transformasi nasionalisme papua. Pustaka sinar harapan. Jakarta

Azwar. (1997). Metodologi penelitian, cetakan sebelas. Jakarta : PT Raja grafindo persada.

Badan pusat statistik (BPS). 2008. Analisis Perkembangan Statistik Ketenagakerjaan (Laporan Sosial Indonesia 2007). Badan pusat statistik. Jakarta.

Firdaus, Muhammad. (2004). Ekonometrika Suatu Pendekatan Aplikatif. Jakarta: PT. Bumi Aksara

Ghozali, Imam. (2012). Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 20 Edisi 6. Penerbit Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang.

Gujarati, Damodar. (2003). Dasar-Dasar Ekonometrik. Terjemahan Sumarno Zain. Jakarta: PT. Salemba Empat.

Hendratno, E.T (2009). Negara kesatuan, desentralisasi dan federalisme. Graha ilmu dan investasi serta pancasila press, Jakarta.

https://www.google.com/Durbin-Watson Table \_ Real Statistics Using Excel.htm

Jhingan. M (2000). Ekonomi Pembangunan Dan Perencanaan, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

J. Supranto. (2003). Statistik, teori dan aplikasi. Edisi lama, penerbit Erlangga Jakarta.

Kuncoro. (2014) Otonomi Dan Pembangunan Daerah, Reformasi, Perencanaan Strategi Dan Peluang, PT Erlangga. Jakarta, hlm.28.

Manurung, Raharja. (2001). Teori Ekonomi Makro. Lembaga Penelitian Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia

Munir. S. (2008). Pengantar ilmu ekonomi makro. Universitas mercu buana: tidak diterbitkan.

Nanga. Muana. (2005). Teori, Masalah Dan Kebijakan Makro Ekonomi . Raja Grafindo Persada.

Richard, D. (2010). Pengaruh Dana Otonomi Khusus Dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Provinsi Papua Tahun 2002-2009. Jurnal.

Saebeni. AB. (2007). Metode penelitian kuantitatif, CV Pustaka setia. Bandung.

sumardjoko,I..(2008). Pengaruh Penerimaan Dana Otonomi Khusus Terhadap Indek Pembangunan Manusia Papua Dan Papua Barat Dengan Belanja. Jurnal.

Todaro. Michale P., dan Smith Stephen C. (2006). Pembangunan Ekonomi Di Duni Ketiga. Edisi 9. Jakarta : Erlangga.

<http://regional.kompas.com/read/2012/12/08/02555246/>Alokasi Dana Besar Tidak Sebanding Kesejahteraan Rakyat Aceh.